

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

TAHUN 2020 - 2024



**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2020**

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2020 – 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk tahun 2020 - 2024. Renstra Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program dan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang akan dilaksanakan langsung oleh pelabuhan perikanan dengan mendorong peran aktif masyarakat perikanan di kawasan pelabuhan perikanan selama kurun waktu tahun 2020 - 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari tahun 2020 - 2024 merupakan pedoman perencanaan dalam menyusun rencana kerja program dan kegiatan tahunan khususnya dalam pembangunan perikanan tangkap selama 5 (lima) tahun ke depan yang berisi strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta dukungan penganggaran untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dokumen rencana strategis ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari melalui pelibatan stakeholder terkait.

Akhirnya, semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat terutama dalam pengembangan perikanan tangkap yang maju, mandiri dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat nelayan yang sejahtera.

Kendari, November 2020
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera
Kendari,



Ir. Mansur, M.M.

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum	2
1. Volume Produksi Perikanan Tangkap	3
2. Nilai Produksi Perikanan Tangkap	5
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak	6
4. Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	8
5. Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan	17
C. Potensi dan Permasalahan	19
D. Lingkungan Strategis	22
BAB 2 VISI, MISI, DAN TUJUAN	25
A. Pembangunan Nasional	25
1. Visi Presiden	25
2. Misi Presiden	25
3. Tujuan Pembangunan Nasional	25
B. Pembangunan Kelautan dan Perikanan	25
1. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan	25
2. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan	26
3. Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan	26
4. Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan	26
C. Pembangunan Perikanan Tangkap	27
1. Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	27
2. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	28
3. Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	28
4. Sasaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	28
D. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	32
1. Visi	32
2. Misi	32
3. Tujuan	33
4. Sasaran Program	33
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	35
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap	35
1. Arah Kebijakan dan Strategi	35
a. Kebijakan Pokok	35
b. Kebijakan Pengarusutamaan	44
B. Arah Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari ...	46

BAB 4	INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	48
	A. Indikator Kinerja	48
	B. Kerangka Pendanaan	50
BAB 5	PENUTUP	51

Daftar Tabel

Tabel 1. Produksi Perikanan 5 Tahun Terakhir	4
Tabel 2. Nilai Produksi Perikanan 5 Tahun terakhir	6
Tabel 3. PNBP 5 Tahun Terakhir	7
Tabel 4. Keragaan Fasilitas di PPS Kendari Tahun 2019	16
Tabel 5. Tingkat Operasional PPS Kendari 5 Tahun Terakhir	18
Tabel 6. Indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai dari program kegiatan yang telah direncanakan untuk periode 2020-2024	48
Tabel 7. Rencana Pendanaan Kegiatan dan Anggaran di PPS Kendari Tahun 2020-2024	50

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung kebijakan pelaksanaan pembangunan nasional, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berupaya melaksanakan seluruh program kegiatan nasional yang telah diagendakan. Dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan bahwa RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019 yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L) termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi **Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.**

Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan perikanan tangkap 2020-2024 memiliki keterkaitan erat secara langsung dengan agenda penguatan ekonomi serta pengembangan wilayah. Presiden juga

memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Untuk itu pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden tersebut agar dapat memberikan peran dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan peluang lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta konsumsi ikan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga.

Pencapaian peran tersebut dilakukan dengan (1) penguatan kebijakan dan regulasi berdasarkan data, informasi, pengetahuan faktual, dan komunikasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan, (2) mengoptimalkan perikanan budidaya, (3) mengembangkan perikanan tangkap, (4) membangkitkan industri kelautan dan perikanan, (5) penguatan sistem karantina ikan, (6) pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, (7) penguatan pengawasan SDKP, (8) penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan, dan (9) penguatan reformasi birokrasi.

Mengacu pada rencana pembangunan kelautan dan perikanan nasional dengan berpedoman pada visi dan misi Presiden Republik Indonesia, maka ditetapkan Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya adalah potensi dan permasalahan termasuk peluang dan ancaman yang ada, sehingga arah pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah perikanan tangkap yang maju, mandiri dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat nelayan yang sejahtera, khususnya di Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara pada umumnya dapat tercapai dengan baik.

B. Kondisi Umum

Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (PPS) merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan dan merupakan pusat industri perikanan terpadu di kawasan timur Indonesia dan khususnya di Sulawesi Tenggara yang terletak di Kel. Punday, Kec. Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan posisi geografis 03° 58' 48'' LS, dan 122° 34' 17'' BT yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP. 64/MEN/2010 Tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) Samudera Kendari, meliputi: (a). wilayah kerja daratan seluas 40,53 Ha); dan wilayah kerja perairan seluas 33,20 ha ; (b). wilayah pengoperasian, yang terdiri

dari wilayah pengoperasian daratan seluas 59,34 Ha; dan wilayah pengoperasian perairan seluas 8,72 Ha.

Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dalam kegiatan ekonomi, berupaya memberikan manfaat yang cukup tinggi bagi masyarakat antara lain ketersediaan fasilitas produksi, pemasaran hasil perikanan, pengawasan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya ikan, pelayanan kesyahbandaran, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, serta penyerapan tenaga kerja. PPS Kendari sebagai basis utama perikanan laut di kawasan Timur Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara dengan daerah penangkapan (*fishing ground*) meliputi WPP 714 dan WPP 715 yang kaya akan sumberdaya ikan baik pelagis maupun demersal dan menjadi salah satu komoditas ekspor hasil perikanan andalan Sulawesi Tenggara.

Capaian Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari Tahun 2015 - 2019

1. Volume Produksi Perikanan Tangkap

Dalam periode lima tahun terakhir (2015-2019) produksi perikanan tangkap dan budidaya di PPS Kendari menurun dengan rata-rata 2,61% yaitu 26.402,37 ton pada tahun 2015 menjadi 23.258,08 ton pada tahun 2019. Penurunan jumlah produksi disebabkan oleh :

- 1) Anomali cuaca sehingga sulit mendapatkan ikan,
- 2) kesulitan operasional kapal perikanan
- 3) pemilik kapal yang tidak melaporkan jumlah hasil tangkapan yang sebenarnya karena pajak atau retribusi.
- 4) Serta adanya permen tentang Moratorium dan larangan Transhifment di laut sehingga kapal - kapal penampung dari beberapa Perusahaan yang ada di PPS Kendari tidak bisa beroperasi lagi

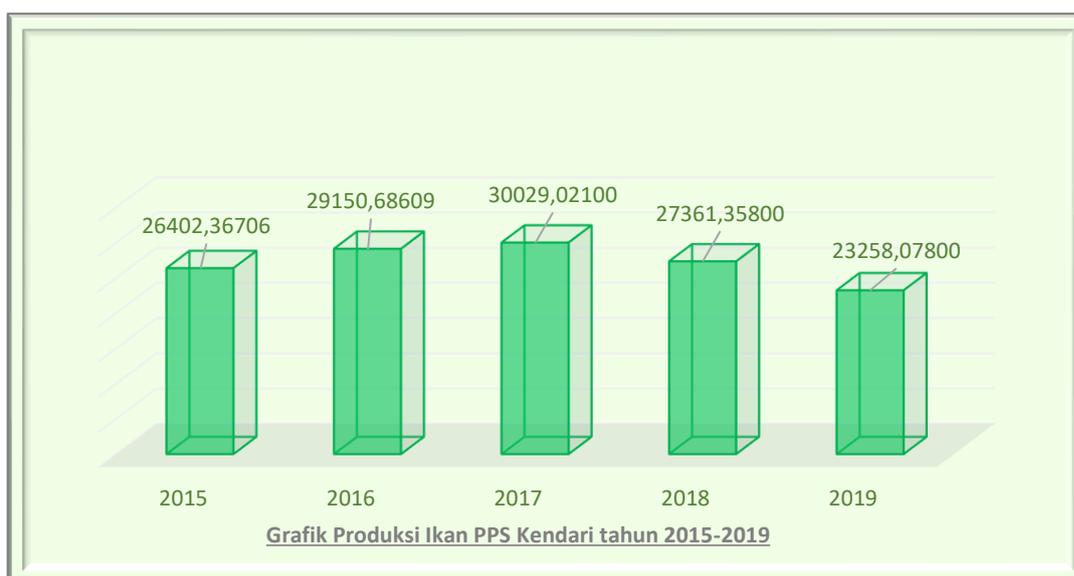
Namun jika dilihat dari tabel produksi dibawah ada juga kenaikan produksi yang terjadi yaitu dari tahun 2015 – 2017. Adapun di tahun 2017 merupakan puncak produksi lima tahun terkahir yang ada di PPS kendari, dikarenakan di tahun 2017 sangat banyak sekali kapal – kapal yang melakukan aktifitas pembongkaran ikan dibandingkan tahun yang lain

Selain itu juga, dalam periode lima tahun terakhir (2015-2019) produksi perikanan tangkap yang ada di PPS Kendari selalu di dominasi oleh jenis ikan Layang, Tongkol, Cakalang dan Madidihang hal ini disebabkan oleh kapal – kapal yang aktif melakukan pembongkaran di PPS Kendari adalah kapal dengan jenis alat tangkap Purse seine yang merupakan alat tangkap penghasil ikan pelagis seperti : Layang, Tongkol, Cakalang, Madidihang dan ikan pelagis lainnya.

Tabel 1. Produksi Perikanan 5 Tahun Terakhir

No.	Jenis Ikan	Tahun					Kenaikan Rata-Rata %
		2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019
1	Madidihang	2.005,38	2.644,08	4.391,34	3.061,26	2.081,43	8,91
2	Tuna Mata Besar	165,72	87,25	52,98	58,90	51,21	-22,13
3	Cakalang	5.273,56	4.965,11	7.567,44	7.387,88	5.350,30	4,15
4	Layang	6.796,96	6.772,63	7.189,70	8.269,86	8.719,02	6,56
5	Tongkol	8.476,95	11.060,95	6.990,08	4.590,22	2.843,10	-19,68
6	Gurita	2.565,44	1.544,07	1.592,08	1.999,47	1.814,66	-5,09
7	Udang Vanname (Budidaya)	629,42	1.312,14	1.510,42	1.504,96	1.693,34	33,93
8	Kembung	23,98	42,86	21,45	92,53	249,24	132,38
9	Kakap Merah	89,30	75,29	38,16	9,27	1,10	-57,21
10	Cumi-cumi	364,65	123,21	27,20	50,09	264,55	92,05
11	Teri	3,67	18,37	27,90	102,27	48,45	166,53
12	Layur		82,41	83,86	39,04	17,60	-35,53
13	Bandeng		266,60	345,29	97,85	41,70	-33,18
14	Ikan Lainnya	7,33	155,72	191,11	97,75	82,40	495,82
Jumlah Total		26.402,37	29.150,69	30.029,02	27.361,36	23.258,08	-2,61

Satuan Ton



Sebagian besar produksi perikanan tangkap di PPS Kendari di peroleh dari WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda) yaitu sebanyak 85,42 % dari total produksi. Sisanya dari Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau (WPP 715) sebesar 14,58 %.

Beberapa hal yang yang menjadi penyebab tidak tercapainya target angka produksi perikanan tangkap adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pendaratan ikan di beberapa lokasi/tempat di kendari
- 2) Cuaca seperti ombak dan angin masih dalam kondisi tidak tenang sehingga mempengaruhi kegiatan penangkapan ikan.
- 3) Kapal nelayan sebagian besar berpinda tempat diluar kendari karena mencari harga ikan yang lebih tinggi.
- 4) Sebagian Kapal nelayan berpindah atau pulang kekampung di Sulawesi (Mandar) dan Sulawesi Selatan (Pinrang, **Pare- Pare**) karena **paktor cuaca**.

Adapun upaya dalam melakukan peningkatan volume produksi perikanan tangkap agar dapat mencapai target perlu dilakukan upaya dan kegiatan antara lain : (1) Optimalisasi pendataan produksi perikanan tangkap di pusat-pusat pendaratan termasuk tangkahan, (2) penguatan pendataan dan peningkatan SDM pengumpulan data.

2. Nilai Produksi Perikanan Tangkap

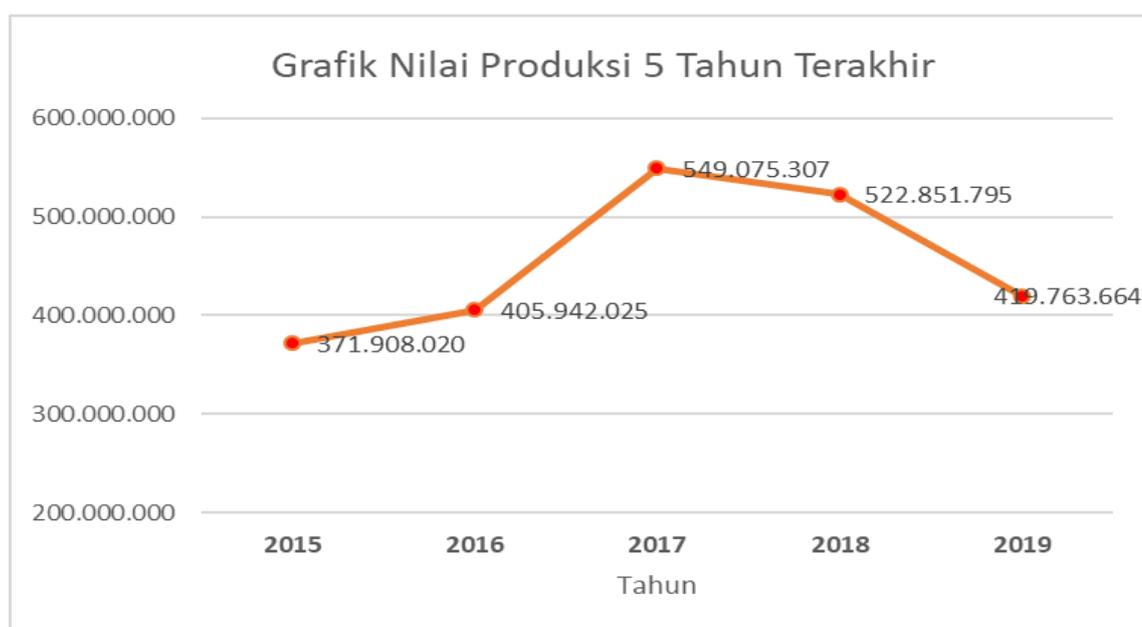
Nilai produksi di PPS Kendari selama 5 tahun terakhir berbanding lurus dengan jumlah produksi yaitu dari tahun 2015 – 2017 mengalami kenaikan dan di tahun 2018 – 2019 mengalami penurunan. Akan tetapi jika dilihat dari persentase selama lima tahun terakhir antara produksi dan nilai produksi mengalami perbedaan yang cukup signifikan, yaitu pada jumlah produksi perikanan dari tahun 2015 – 2019 mengalami persentase penurunan sebesar 2,61% sedangkan nilai produksi perikanan pada dari tahun 2015 - 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,98%.

Persentase kenaikan nilai produksi perikanan di PPS Kendari selama 5 tahun terakhir ini disebabkan oleh meningkatnya daya beli dari pembeli lokal yang menggunakan mobil – mobil Pickup dalam proses pembelian dan pemasaran ikan mereka baik dari dalam provinsi maupun dari luar provinsi seperti sulawesi selatan dan sulawesi tengah. Mereka berani menawarkan harga yang lebih dari harga yang di tawarkan oleh UPI yang ada di PPS Kendari terhadap 4 jenis produksi perikanan yang dominan yaitu ikan layang, tongkol, cakalang dan madidihang.

Tabel 2. Nilai Produksi Perikanan 5 Tahun terakhir

Rp.1000

No	Jenis Ikan	Tahun					Kenaikan Rata-Rata %
		2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019
1	Madidihang	28.075.254	39.432.725	72.647.523	48.951.392	29.904.673	13,29
2	Tuna Mata Besar	2.485.797	1.401.539	942.518	1.010.475	978.228	-18,09
3	Cakalang	73.829.906	73.725.919	124.172.627	118.178.202	70.102.535	5,69
4	Layang	81.563.562	101.029.336	128.764.473	142.140.867	111.218.763	9,99
5	Tongkol	67.815.644	104.598.748	89.991.756	59.852.961	23.413.935	-13,52
6	Gurita	89.790.526	42.997.586	58.337.817	80.422.678	88.510.516	7,87
7	Udang Vanname (Budidaya)	20.141.312	32.685.864	64.065.390	65.349.200	83.442.818	46,99
8	Kembung	239.809	665.467	340.285	1.633.121	4.331.476	168,45
9	Kakap Merah	2.009.238	1.871.355	955.815	245.735	27.500	-54,72
10	Cumi-cumi	5.834.387	2.078.683	435.988	860.813	5.205.455	114,69
11	Teri	25.704	187.339	247.469	874.575	434.504	216,00
12	Layur		576.848	1.021.364	559.735	286.600	-5,65
13	Bandeng		4.265.560	5.869.964	1.810.225	750.600	-30,03
14	Ikan Lainnya	96.880	425.057	1.282.321	961.819	1.156.062	133,91
Jumlah Total		371.908.020	405.942.025	549.075.307	522.851.795	419.763.664	4,98



3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

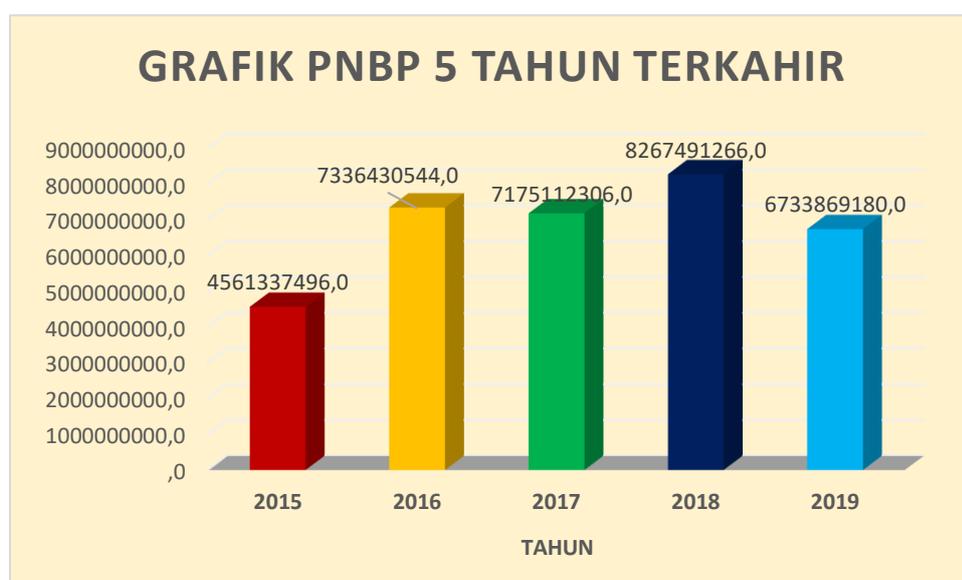
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berperan penting dalam menunjang kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan sebagai upaya pemerintah dalam rangka peningkatan pendapatan non migas khususnya dari sektor kelautan dan perikanan. Sumber Penerimaan Negara Bukan

Pajak di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari terdiri dari :

1. Penerimaan Umum antara lain penerimaan sewa rumah dinas pengembalian belanja pegawai, lelang barang inventaris, lelang Kendaraan dan Pengembalian pekerjaan.
2. Penerimaan Fungsional terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu dari :
 - a). penerimaan jasa pelabuhan yang antara lain jasa tambat labuh, jasa air, jasa pas masuk, jasa kebersihan pelabuhan, pengolahan air limbah dan air laut bersih/sumur bor.
 - b). penggunaan sarana dan prasarana (jasa penggunaan alat/kendaraan/bengkel, penggunaan tanah dan bangunan, penggunaan sarana dan prasana) serta jasa lainnya (pemakaian listrik dan eksploitasi listrik 10 %).

Tabel 3. PNBP PPS Kendari 5 Tahun Terakhir

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	% Capaian
2015	4.561.337.496	3.869.784.397	117,87
2016	7.336.430.544	4.548.539.557	161,29
2017	7.175.112.306	5.470.000.000	131,17
2018	8.267.491.266	5.951.250.000	138,92
2019	6.733.869.180	6.083.000.000	110,70
Kenaikan Rata - Rata 2015 - 2019	13,83	%	



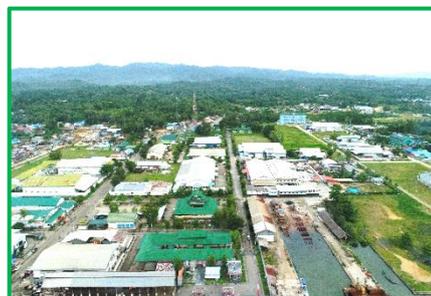
Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2015 s/d 2019 di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari cukup fluktuatif, perolehan PNBP tertinggi diperoleh tahun 2018 sebesar Rp 8.267.491.266,-. Perolehan PNBP terendah diperoleh pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.516.337.496.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 6.733.869.180 atau 110,70 dari target yang di tetapkan sebesar 6.083.000.000 bila dibandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2018 Rp. 8.173.615.366 terdapat penurunan sebesar Rp.1.439.746.186 atau 18%.

4. Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan dinyatakan bahwa pelabuhan harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas sesuai dengan kelas/type pelabuhan. Pelabuhan perikanan Kendari sebagai pelabuhan kelas Samudera telah dilengkapi dengan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.

Luas lahan PPS Kendari adalah 40,53 Ha, yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) lokasi/kavling berdasarkan pembangunannya yaitu Kavling Timur yang merupakan awal pembangunan yang dimulai pembangunan pada tahun 1984 yang telah dilengkapi fasilitas



pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang, dan untuk kavling Barat dengan luas 12,62 Ha yang merupakan pengembangan PPS Kendari yang dimulai pembangunan pada awal 1993. Total investasi di PPS Kendari sampai tahun 2019 telah mencapai Rp. 671,66 Milyard, jumlah investasi tersebut merupakan investasi pemerintah sebesar Rp. 295,01 Milyar dan investasi swasta sebesar Rp 376,65 milyar.

a. Area Pelabuhan dan Kolam Pelabuhan

PPS Kendari memiliki lahan seluas 40,53 Ha, terdiri dari lahan yang digunakan untuk fasilitas umum seluas 18,62 Ha dan lahan industri seluas 21,3 Ha, dari luas lahan industri tersebut 14,01 Ha telah digunakan oleh 36 (tiga puluh tujuh) investor yang bergerak di bidang industri penangkapan, industri pengolahan ikan, dan industri penunjang dengan kegiatan usaha terlampir.

PPS Kendari telah mempunyai wilayah kerja dan pengoperasian sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.64/MEN/2010 Tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian PPS Kendari yang sebelumnya telah mendapat pengakuan dari Walikota Kendari sesuai Surat Nomor : 523/2232, tanggal

30 Juli 2007 perihal Rekomendasi WKOPP-PPS Kendari. Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian PPS Kendari meliputi :

- 1) Wilayah kerja daratan seluas 40,53 Ha dan wilayah kerja perairan seluas 33,20 Ha;
- 2) Wilayah pengoperasian daratan seluas 59,34 Ha dan wilayah pengoperasian perairan seluas 8,72 Ha;

b. Dermaga dan Talud

Sebagai pelabuhan samudera maka PPS Kendari telah dilengkapi fasilitas dermaga dengan kedalaman -6 meter berukuran 130 m x 10 m yang dapat disandari kapal sampai dengan ukuran 3000 GT, dan dermaga dengan kedalaman -2,5 meter berukuran 130 m x 10 m yang dapat disandari kapal berukuran ≤ 60 GT atau kapal dengan draft 2 m. Revetment dengan panjang 270 m khusus untuk kapal ≤ 30 GT yang bongkar ikan dan terdapat talud sepanjang 2.765 m² yang mengelilingi kavling sisi timur dan barat sebagai tanggul penahan tanah pelabuhan serta menahan gelombang.

c. Jalan Pelabuhan

Luas jalan di PPS Kendari seluruhnya 29.945 m² yang meliputi jalan utama dengan lebar 12 m dan jalan areal industri dengan lebar 6 m, jalan ini belum seluruhnya diaspal terutama jalan pengembangan industri sisi barat, sedangkan jalan pada kompleks perumahan terbuat dari paving blok. Akses masuk ke dalam kawasan PPS Kendari dapat dilakukan melalui pintu masuk disisi timur dan pintu masuk disisi barat. Karena terbatasnya petugas maka pintu masuk sebelah barat dibuka sewaktu dibutuhkan saja.

d. Kantor Utama PPS Kendari

PPS Kendari memiliki bangunan kantor pelayanan dan kantor utama yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan organisasi dan administrasi perkantoran dengan luas bangunan 1.326 m², untuk pelayanan umum dan rutin seperti pelayanan rekomendasi BBM, penerbitan SHTI dan logbook dilakukan pada kantor/gedung pelayanan terpadu yang luasnya 600 m².



e. Kantor Pelayanan Terpadu



Untuk melaksanakan pelayanan prima bagi masyarakat perikanan dan atau nelayan maka PPS Kendari telah menyiapkan gedung pelayanan bersama dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Hubungan kerja tersebut berdasarkan Permen Nomor:

PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan pasal 31 ayat (4), dilaksanakan dengan prinsip koordinasi. Instansi yang menempatkan petugasnya antara lain Pengawas Sumberdaya Perikanan, Karantina Ikan, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Gedung pelayanan terpadu ini digunakan khusus untuk memberikan pelayanan terhadap nelayan yang difokuskan pada proses penerbitan SPB (Surat Persetujuan Berlayar), Logbook penangkapan ikan, SLO (Surat Laik Operasi), Kesehatan kapal dan awak kapal dan Badan Karantina Ikan dan Pengujian Mutu (BKIPM).

f. Suar Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)

Dalam rangka keselamatan berlayar didalam kolam pelabuhan maka PPS Kendari telah menempatkan 3 (tiga) lampu suar yang terdiri 2 (dua) Suar Bantu Navigasi Pelayaran (light buoy) dan 1 (satu) Suar/lampu Pelabuhan (light beacon) yang terdapat pada ujung timur dermaga pelabuhan, lampu-lampu ini menggunakan sumber energi dari baterai kering/accu dengan solar cell.



g. Instalasi Air Bersih

Air bersih PPS Kendari bersumber dari air bawah tanah dengan kedalaman rata-rata 110 m². Terdapat 5 (lima) titik dengan kapasitas debit rata-rata 12 m³/jam/titik. Air ini sebelum didistribusikan terlebih dahulu diproses secara fisik (aeration and sedimentation) untuk membuang gas/bau dalam air dan mengendapkan lumpur serta pasir. Selanjutnya dengan perlakuan kimiawi di unit pengolahan air (Water Treatment) proses ini menggunakan bahan kimia seperti Poly Aluminium Chloride (PAC) untuk mengikat lumpur dan partikel-partikel lain seperti



zat besi (Fe), Mangan (Mn), zat kapur (Ca). Selanjutnya menambahkan NaClO dan Ca(OCl)₂ untuk membunuh kuman dan menjernihkan air dan Active Carbon untuk menyaring dan menjernihkan ulang. Selanjutnya ditampung dalam penampungan (reservoar) berkapasitas sebesar 700 m³ untuk siap didistribusikan

secara gravitasi kepada pelanggan.

e. Instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar

Penyalur Bahan Bakar Minyak di PPS Kendari ada 3 (tiga) penyalur yaitu:

- Instalasi SPBN untuk kapal perikanan yang dimiliki dan dikelola oleh Perusahaan Daerah PD. Utama Sultra yang menyalurkan BBM Solar bersubsidi dan non subsidi dengan kapasitas tangki 2 x 31 Klt. Untuk BBM Solar subsidi khusus untuk kapal perikanan berukuran ≤ 30 GT. SPBN ini mendapat alokasi sebesar 400 KI perbulan atau 16000 liter perhari dengan kapasitas tangki sebesar klt;
- Penyaluran BBM Non Subsidi dilayani oleh PT. Mitra Utama Energi yang disuplay melalui tongkang untuk melayani kebutuhan kapal perikanan yang berukuran >30 GT BBM Solar dan untuk industry;
- Penyaluran BBM Solar non subsidi melalui tangki PPS Kendari berkapasitas 2 x 500 Klt yang operasionalnya dilakukan oleh PT. Global Arta Borneo, BBM Solar yang dilakukan adalah BBM Non Subsidi untuk melayani kapal dan industri.



h. Sarana Bongkar Muat dan Kebersihan

Untuk menunjang kegiatan pelayanan bagi masyarakat perikanan PPS Kendari memiliki beberapa sarana penunjang yang antara lain truck crane



berjumlah 3 (tiga)

unit, elektrik forklift 3 (tiga) unit dump truck sebanyak 3 (tiga) unit, 1 (satu) unit digunakan untuk mengangkat sampah dari Unit-unit pengolahan ikan (perusahaan)



dan dari fasilitas umum yang ada diPPS Kendari ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), selain berfungsi untuk kegiatan rutin tersebut diatas sarana penunjang dapat digunakan oleh pihak kedua sesuai tarip sewa dalam PP 75 tahun 2015.

10. Pengolahan Limbah

Seluruh limbah cair buangan dari kantor, toilet umum dan Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang berada dalam kavling Timur PPS Kendari telah terkoneksi ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berkapasitas 400 KI, limbah tersebut sebelum dibuang akan diproses terlebih dahulu.



Tahapan proses pengolahan limbah melalui proses aerasi yaitu meningkatkan konsentrasi oksigen dalam air limbah untuk membantu bakteri aerob dalam bermetabolisme sehingga bakteri tersebut dapat bekerja secara optimal dalam menurunkan konsentrasi zat organik di dalam air limbah dan oksigen bebas ini bermanfaat untuk proses oksidasi senyawa kimia dalam air limbah serta menghilangkan bau. Selanjutnya air limbah yang di erasi diendapkan pada bak sedimentasi dan kemudian air limbah yang telah aman bagi lingkungan siap untuk dibuang.

i. Tempat Pembongkaran Ikan

Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari ada 3 (tiga) tempat pembongkaran ikan yang telah dilengkapi dengan fasilitas bangunan beratap sehingga ketika kapal melakukan kegiatan bongkar produk perikanan yang dibongkar terhindar dari paparan sinar matahari langsung atau dari hujan, tempat pembongkaran atau pemasaran yaitu :

j. Hanggar Pembongkaran Ikan

Hanggar pembongkaran ikan berada di kavling Timur merupakan bangunan terbuka yang telah dilengkapi dengan atap akan tetapi tidak berdinding, belum ada dermaga hanya berupa revetment/turap tempat ini merupakan tempat bongkar ikan kapal untuk yang berukuran kapal ≤ 30 Gt, Hanggar ini dibangun pada tahun 2008 yang dengan ukuran luas 635 m².



k. Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Higienis

Tempat Pemasaran Ikan di PPS Kendari berada di Hanggar pembongkaran ikan dan TPI Higienis, untuk TPI Higienis mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret 2018, berada di kedalaman kolam -2,5m sehingga kapal yang dapat bongkar hanya untuk kapal berukuran <60 GT.

Karena keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) maka untuk operasional TPI higienis saat ini hanya beroperasi sampai dengan jam 23:00 dengan melibatkan seluruh seksi yang ada dengan pembagian jadwal piket jaga antara lain :

- Piket jaga petugas untuk penyediaan sarana seperti sepatu boot, rompi, sarung tangan, keranjang, timbangan dan kursi;
- Piket jaga petugas kesyahbandar untuk pengaturan masuk keluar kapal;
- Piket petugas Inspeksi pembongkaran ikan untuk mengecek mutu ikan dan pendataan jenis, ukuran dan jumlah ikan bongkaran dan
- Piket petugas kebersihan;



l. Tempat Pembongkaran, Pemasaran dan Distribusi (PPDI) Ikan

Pembongkaran, Pemasaran dan Distribusi (PPDI) Ikan merupakan bangunan beratap dan berdinding dengan ukuran 56 x 14 m yang dilengkapi dengan selasar, PPDI ini dibangun dari anggaran Direktorat Jenderal Penguatan dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2015 dan 2017 bangunan ini hanya bisa digunakan untuk kegiatan bongkar ikan kapal berukuran <10 GT mengingat pada tempat ini pada kolam pelabuhan masih dangkal dengan kedalaman kolam 1-2 m dan belum dilengkapi dengan dermaga

hanya



berupa revetment.

Penggunaan PPDI mulai digunakan awal tahun 2019 sampai desember 2019, pelaku usaha yang melakukan kegiatan di PPDI adalah:

- Kapal yang bongkar sebanyak 309 kapal.
- Kapal yang isi perbekalan 534 kapal.
- Pembeli ikan sebanyak 311 pembeli.
- Ikan yang dibongkar 525.500 Kg terdiri dari Layang, Tongkol, Cakalang, Madidihang, belut dan kembung.

m. Mess, Balai Pertemuan dan Shelter Nelayan

PPS Kendari memiliki mess atau penginapan dengan jumlah 24 kamar yang disewakan untuk umum. Selain itu tersedia pula shelter atau tempat peristirahatan nelayan seluas 150 m² untuk istirahat nelayan, buruh pelabuhan dan karyawan pabrik. Shelter ini



dilengkapi dengan fasilitas berupa tv, lemari, lampu penerangan, kipas angin, serta tempat duduk.

n. Rumah Tamu (Guest House) dan Perumahan Pegawai

PPS Kendari memiliki rumah tamu (guest house) sebanyak 2 (dua) unit dengan luas masing-masing 70 m², dan masing-masing unit dilengkapi dengan 2 (dua) kamar lengkap dengan tempat tidur, lemari, AC. Dapur dan kamar mandi. Pelabuhan juga memiliki rumah dinas bagi pegawai dengan tipe 120 sebanyak 3 (tiga) unit, tipe 70 sebanyak 6 (enam) unit serta mess bagi operator/pegawai.



o. Poliklinik

Dalam kawasan pelabuhan terdapat poliklinik dengan luas bangunan 90 m² yang memberikan pelayanan kesehatan bagi pekerja juga digunakan untuk Pos pelayanan terpadu (Posyandu) bagi masyarakat sekitar pelabuhan, poliklinik dibawah pembinaan Puskesmas



Kecamatan Abeli Dinas Kesehatan Kota Kendari serta untuk pelayanan kesehatan kapal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan.

p. Masjid



Pelaku usaha serta masyarakat yang beraktifitas di PPS Kendari mayoritas umat Islam oleh karena itu PPS Kendari menyediakan tempat ibadah berupa masjid. Masjid yang dibangun seluas 330 m² digunakan untuk ibadah sehari-hari dan kegiatan besar umat Muslim dalam lingkup PPS Kendari dan

masyarakat sekitar pelabuhan.

q. Kios Waserda dan Kantin

Untuk memenuhi kebutuhan nelayan atau pekerja di pelabuhan maka PPS Kendari telah tersedia kios, rumah makan, kantin yang berjumlah 5 (lima) unit dan waserda/kedai pesisir yang menyiapkan semua kebutuhan logistik/perbekalan bagi awak kapal.



r. Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)



Sumber air tawar yang dipergunakan oleh UPI dan kapal berasal dari sumur dalam (Deep weel), selain itu PPS Kendari juga terdapat instalasi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang merupakan alat untuk memproses air laut menjadi air laut bersih atau higienis yang juga dapat mengubah air laut menjadi air tawar higienis yang dapat digunakan untuk kebutuhan perbekalan kapal dan untuk proses

pengolahan ikan. SWRO PPS Kendari mempunyai kapasitas produksi sebesar 500 m³/hari yang dapat dioperasikan secara otomatis maupun manual.

Tabel 4. Keragaan Fasilitas di PPS Kendari Tahun 2019

No	Jenis Fasilitas	Pembangunan	Volume/Luas
A Fasilitas Pokok			
1	Lahan :	1986-2006	40,53 Ha
2	Kolam Pelabuhan	1990	41,92 Ha
3	Dermaga		
	- (- 6,0 m)	1990-2006	130 x 10 m
	- (- 2,5 m)	1990-2006	2x (130 x 10 m)
4	Jalan dan Drainase :		
	- Jalan kompleks	1990-2006	29.945 m ²
	- Drainase	1990-2007	7,059 m ²
5	Talud	1986-2014	2.765 m ²
B Fasilitas Fungsional			
1	Kantor Administrasi Pelabuhan	1990	1.326 m ²
2	Gedung pelayanan terpadu	1990	600 m ²
3	Rambu Navigasi	1990 - 2013	3 unit
4	Instalasi Pengolahan air Bersih.	1990	700 KL
5	Instalasi BBM	1990	2 x 500 KL
6	Sumbur Dalam (Deep Weel)	1990-2066	6 Unit
7	Instalasi IPAL	1990-2006	400 KL
8	SWRO	2014	500 kl
9	Instalasi Listrik :		
	- Genset	1990	2 x 250 KVA
	- PLN	1993	1.110 KVA
10	Telekomunikasi :		
	- Telepon	1999	1 line
	- Interkom	1991-1992	12 Line
	- Internet	2012	1 Unit
	- Website	2014	1 Unit
11	Sarana bongkar muat :		
	- Truck crane	1991, 2014	2 unit
	- Forklift Kapasitas 2 ton	2014	4 unit
	- Forklift Kapasitas 5 ton	2014	1 Unit
C FASILITAS PENUNJANG			
	- Pompa Penyemprot Air panas.	2014	2 Unit
	- Ampibus	2014	1 Unit
	- Alat Kebersihan	2014	1 Unit
	- Dump Truck	2011-2014	3 Unit
12	Gedung Bengkel dan Genset	1990	375 m ²
13	Fuel sales	1990	96 m ²
14	Pos jaga (3 buah)	1990-2000	136 m ²
15	MCK	1990 – 2007	126 m ²
16	Tempat parkir	1990	1.741 m ²

17	Garasi Mobil Operasional	2014	60 m ²
18	Pagar keliling	1990 – 2014	2.417 m
29	Gedung Hanggar	2006	635 m ²
20	Toko nelayan (Waserda)	2006	90 m ²
21	Sumur Dalam	1986-2007	6 unit
22	Kamera monitor (CCTV)	2007	12 Unit
24	Incenerator	1997	34 m ²
D	Fasilitas Penunjang		
1	Balai pertemuan nelayan	1990	720 m ²
2	Penginapan nelayan	1990	672 m ²
3	Guest house	1990	140 m ²
4	Poliklinik	1997	90 m ²
5	Musholla	1990	48 m ²
6	Masjid	1996	181 m ²
7	Gudang	2007	200 m ²
8	Shelter nelayan	2007	150 m ²
9	Gedung Penunjang Keuangan	2007	101 m ²
10	Gedung TPI Hygeynis	2017	110 m ²
11	Gedung PPDI	2016	100 m ²
E	Rumah Negara		
	- Type 50 14 Unit	1990 - 2007	700 m ²
	- Type 70 6 Unit	1990	420 m ²
	- Type 120 3 Unit	1990	360 ²

5. Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan

Indikator ini merupakan Persentase operasional Pelabuhan Perikanan memuat kegiatan yang terkait di Operasional Pelabuhan. Kegiatan ini antara lain ;

- (1) Frekwensi pengiriman data (PIPP)
- (2) E-Logbook
- (3) Aplikasi SPB Online
- (4) SHTI
- (5) Realisasi penyerapan anggaran
- (6) Pendapatan pelabuhan
- (7) Ketersediaan SDM Pengelola PP
- (8) Kapasitas Daya Tampung kolam pelabuhan
- (9) Panjang Dermaga
- (10) Kedalaman Kolam
- (11) Sarana Pelabuhan (Docking, Bengkel)
- (12) Kelengkapan Fasilitas pemasaran dan distribusi ikan
- (13) Ketersediaan lahan pelabuhan
- (14) Pelayanan Tambat Labuh
- (15) Produksi perikanan
- (16) Frekwensi kunjungan Kapal

- (17) STBLKK
- (18) Sosialisasi dan BIMTEK
- (19) Fasilitas Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian SDI, Perkarantinaan ikan, Publikasi
- (20) Pelaksanaan K5
- (21) Penyaluran air bersih (Kapal dan Industri pengolahan)
- (22) Penyaluran Es (Kapal)
- (23) Penyaluran BBM (Kapal)
- (24) Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP
- (25) Pemanfaatan Lahan Pelabuhan
- (26) Penyerapan Tenaga Kerja
- (27) Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan.

Perhitungan dari indikator ini adalah nilai dari indikator kinerja pelabuhan perikanan merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan di PPS Kendari.

Tingkat operasional pelabuhan diambil dari nilai evaluasi kinerja yang ada di Aplikasi PIPP melalui Web <http://integrasi.djpt.kkp.go.id/> . Untuk evaluasi kinerja yang ada di PPS Kendari selalui melampaui nilai standart yaitu nilai 75 dengan kriteria baik. Adapun kenaikan rata – rata tingkat operasional PPS kendari berdasarkan hasil nilai evaluasi kinerja yang ada di aplikasi PIPP dari tahun 2015 – 2019 sebesar 1,88%. Peningkatan tingkat operasional di PPS kendari selama 5 tahun terakhir ini disebabkan oleh bertambah beberapa aplikasi online yang terintegrasi Web <http://integrasi.djpt.kkp.go.id/> atau biasa di DSS (*Data Sharing System*) seperti aplikasi SPB Online, Teman SPB yang di dalamnya memuat laporan STBLKK. Selain itu juga, adanya perubahan jumlah investor yang ada di PPS kendari menjadi salah satu poin besar dalam meningkatnya tingkat operasional pelabuhan perikanan.

Untuk menangani permasalahan yang terjadi diharapkan upaya tindak lanjut yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi antar seksi lingkup PPS Kendari dengan memproporsikan anggaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
- Penguatan pendataan di lokasi pendaratan ikan dengan peningkatan SDM baik dari kuantitas petugas maupun kualitas data yang disampaikan sehingga dapat memenuhi kriteri kelas pelabuhan perikanan untuk volume hasil produksi per harinya.
- Perlunya dukungan dan sinergitas antar seksi untuk melakukan pengimputan terkait dengan data PIPP.

Tabel 5. Tingkal Operasional PPS Kendari 5 Tahun Terakhir

Tahun					Kenaikan Rata-Rata %
2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019
79,50	81,00	85,00	88,00	85,50	1,88



C. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Potensi pengembangan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat pada faktor eksternal dan juga internal sistem dalam pengembangan perikanan tangkap termasuk berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Beberapa potensi utama yang dimiliki yakni sebagai berikut:

1). Stok Sumber Daya Ikan

Pemberantasan IUU Fishing, intensifikasi alat tangkap ramah lingkungan, serta upaya pro-environment lainnya telah berhasil meningkatkan stok sumber daya ikan dalam 5 tahun terakhir. Secara faktual, nelayan di beberapa lokasi pun telah merasakan kemudahan dalam usaha penangkapan ikan, khususnya nelayan yang melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah WPP 714 yang produksi ikannya di daratkan di PPS Kendari.

2). Instrumen Pengelolaan Perikanan Berbasis WPP;

Sejauh ini seluruh kondisi prasyarat utama dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan berbasis WPP telah terpenuhi; mulai dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) yang telah disusun, penetapan dan operasionalisasi Lembaga Pengelolaan Perikanan (LPP), maupun penetapan mekanisme pengaturan lainnya. Kebijakan pengelolaan perikanan tangkap di PPS Kendari juga mengacu pada pengelolaan perikanan berbasis WPP sehingga potensi pengembangan perikanan tangkap di PPS Kendari akan lebih terkendali dan lestari.

3). Potensi Produksi Perikanan Budidaya dan Perairan Umum Daratan;

Pengelolaan perikanan budidaya dan perairan umum daratan (PUD) di Wilayah Sulawesi Tenggara turut memberikan andil dalam pengembangan perikanan tangkap di PPS Kendari khususnya dalam mendukung aktivitas UPI dalam kawasan PPS Kendari,

mengingat suplai bahan baku pada sebagian UPI yang ada diperoleh dari kegiatan budidaya khususnya untuk komoditi udang dan bandeng.

4). Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Berbasis *Eco Fishing Port* melalui Program AFD

Melalui pengembangan Pelabuhan perikanan berbasis *eco fishing port* pada program AFD (*Agence Francaise De Developpement*), maka potensi pengembangan industri perikanan di PPS Kendari di masa mendatang masih cukup terbuka hal ini didukung oleh dukungan fasilitas dan luas tanah yang ada. Karena itu pengembangan PPS Kendari melalui program AFD ini diharapkan dapat mendukung kesempatan berusaha bagi investor yang berniat melakukan investasi usaha di PPS Kendari.

Potensi penambahan produksi ikan di PPS Kendari juga masih memungkinkan dilakukan, hal ini didukung oleh kapasitas Cold Storage dan ABF yang masih cukup tersedia. Sehingga potensi peningkatan rata – rata produksi per hari bisa ditingkatkan mencapai 180 – 200 ton. Penambahan potensi produksi tersebut dapat dilakukan melalui peluang penambahan armada penangkapan ikan khususnya kapal > 30 GT.

b. Permasalahan

Secara umum Perikanan tangkap memiliki permasalahan yang cukup kompleks karena terkait dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Ada berbagai isu yang muncul saat ini terkait dengan pengelolaan perikanan laut di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian SDI dan lingkungan dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan. Praktek-praktek IUU Fishing yang terjadi baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia maupun oleh kapal-kapal perikanan asing yang menyebabkan kerugian dari berbagai aspek.

Kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia masih lemah, untuk itu kapasitas dan kapabilitas petugas pengawasan harus terus ditingkatkan, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Permasalahan dalam pembangunan perikanan tangkap mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem perikanan tangkap di Indonesia. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) permasalahan utama, yakni sebagai berikut:

1). Kapasitas nelayan; Rendahnya kemampuan nelayan dalam menerapkan teknologi penangkapan ikan produktif dan efisien serta yang ramah lingkungan, dan rendahnya pengetahuan nelayan tentang cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan, karena itu PPS Kendari terus melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran pelaku utama terutama nelayan.

2). Kesejahteraan nelayan; Belum terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga nelayan serta rendahnya kemampuan nelayan dalam mengakses sumber permodalan dan mengelola keuangan dalam menghadapi kerentanan usaha penangkapan ikan terhadap perubahan lingkungan dan cuaca.

3). Mindset masyarakat perikanan tangkap; Usaha penangkapan ikan masih terbatas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan jangka menengah, belum sampai sepenuhnya pada upaya mendukung industrialisasi ataupun menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan

4). Sarana prasarana usaha penangkapan ikan; belum optimalnya infrastruktur pelabuhan perikanan, konektivitas sistem informasi yang kurang, struktur armada kapal perikanan yang didominasi kapal kecil dengan jangkauan yang terbatas, minimnya armada kapal perikanan yang memenuhi laik tangkap dan laik simpan, kurangnya pendataan kapal dan alat penangkapan ikan yang *reliable*, minimnya penyerapan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan efisien

5). Konektivitas analisis dan pemantauan pemanfaatan usaha; belum jelasnya mekanisme pendataan nelayan kecil, serta belum optimalnya integrasi perizinan usaha antara pusat-daerah, dan kurangnya intensifikasi penggunaan sistem IT.

Sedangkan tantangan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, diantaranya adalah (1) optimalisasi kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), (2) harmonisasi tata ruang laut dan darat untuk penguatan penyelarasan antara RTRW dengan RZWP3K dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional/Tertentu (RZ KSN/KSNT), (3) masih terjadinya praktek IUU *fishing* dan *destructive fishing*, dan (4) sinergi stakeholders dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan. Dalam kondisi ini nelayan terkendala dengan pemenuhan persyaratan prosedural perbankan yang dianggap cukup rumit dan panjang.

Kondisi kesejahteraan pada nelayan dan pelaku usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan pendapatan yang diperolehnya masih sangat terbatas. Permasalahan yang dihadapi dalam menghadapi MEA 2015 utamanya adalah belum adanya perlindungan terhadap pelaku usaha UMK untuk meningkatkan daya saing melalui sinergi lintas sektor termasuk dalam mengakses pembiayaan, perlindungan terhadap pasar domestik dan sertifikasi produk. Melalui Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 diharapkan semua kegiatan ini dapat diatasi dengan menghadirkan negara dalam setiap urusan masyarakat.

D. Lingkungan Strategis

Dalam menetapkan rencana strategis 5 (lima) tahun ke depan 2020-2024, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari melakukan analisis dalam memetakan lingkungan strategis organisasi dengan teknik analisis kekuatan (*strength*) - kelemahan (*weakness*) - peluang (*opportunities*) - hambatan (*threats*) atau SWOT Analysis sebagai jembatan yang menghubungkan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang telah ditetapkan dengan strategi, kebijakan dan program pembangunan yang akan ditempuh maka perlu diawali dengan analisis lingkungan strategis yang senantiasa berkembang dinamis. Analisis dimaksud mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, dimana masing-masing analisis ditinjau dari tiga aspek utama, yakni sosial, ekonomi dan ekologi.

• Faktor Internal

a. Kekuatan (*Strenght*)

Dengan memperhatikan *stakeholders* dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari memiliki kekuatan yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Lokasi PPS Kendari yang langsung menghadap Laut Banda adalah merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-714 dan 715) dengan beberapa keanekaragaman sumberdaya ikan dan mempunyai nilai ekonomis tinggi yang masih potensial untuk dikembangkan pengelolaannya.
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana yang terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan master plan.
- 3) Tersedianya data statistik dan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan yang dapat mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan secara bertanggungjawab.
- 4) Tersedia dan telah operasionalnya prasarana pelayanan terpadu di kawasan PPS Kendari.
- 5) Pelayanan Publik berstandar ISO 9001 : 2008

b. Kelemahan

Disamping kekuatan yang dimiliki, analisis terhadap lingkungan internal juga memperhatikan unsur-unsur kelemahan yang harus dipertimbangkan antara lain :

- 1) Kemampuan manajemen maupun teknis SDM yang masih kurang memadai.
- 2) Penurunan kapasitas faslitas pokok pelabuhan terutama pendangkalan kolam pelabuhan
- 3) Terbatasnya biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas prasarana pelabuhan.
- 4) Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran serta keterampilan nelayan dalam penanganan ikan hasil tangkapan

- **Faktor Eksternal**

- a. Peluang**

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dan pengembangan perikanan tangkap sesuai visi dan misi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah sebagai berikut:

- 1) Tumbuh dan berkembangnya iklim usaha sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong peningkatan investasi di wilayah Kota Kendari.
- 2) Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 3) Semakin meningkatnya pangsa pasar produk perikanan baik lokal maupun nasional, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk mengkonsumsi produk pangan yang bergizi dan menyehatkan.
- 4) Aksesibilitas distribusi hasil perikanan

- b. Ancaman/Tantangan**

- 1) Kurangnya komitmen instansi terkait dalam penerapan regulasi perikanan.
- 2) Maraknya pembangunan industri diluar Kawasan sehingga mengancam eksistensi industry dalam kawasan.
- 3) Pendaratan ikan belum mampu memenuhi kapasitas pengolahan ikan yang ada dalam Kawasan.
- 4) Masih rendahnya kemampuan masyarakat menyerap informasi yang ada di Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan.
- 5) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perikanan khususnya nelayan yang bisa dilihat dari rendahnya tingkat pendidikannya menyebabkan proses alih teknologi dan ketrampilan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga berdampak pada kemampuan pengembangan usaha.
- 6) Masih rendahnya mutu hasil perikanan yang menyebabkan nilai jual produk perikanan menjadi rendah.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal, maka dapat diketahui unsur-unsur kekuatan (strenght), kelemahan (weakness) peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Keempat unsur tersebut harus dapat dianalisa untuk menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.



ANALISIS

Strategi S-O

1. Peningkatan investasi di kawasan PPS Kendari
2. Meningkatkan pelayanan publik standard ISO 9001:2008
3. Meningkatkan produktifitas kapal perikanan dan keberlanjutan usaha
4. Peningkatan ekspor hasil perikanan yang bebas IUU Fishing

Strategi W-O

1. Pengerukan kolam pelabuhan
2. Penambahan dan peningkatan kompetensi SDM
3. Pembangunan fasilitas pelabuhan
4. Penambahan armada penangkapan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perikanan tangkap
5. Peningkatan dukungan koordinasi pemda terhadap operasional pelabuhan

Strategi S-T

1. Pengembangan inovasi IPTEK Kelautan dan Perikanan
2. Pengendalian IUU Fishing untuk keberlanjutan SDI
3. Memfasilitasi berkembangnya investasi usaha perikanan tangkap dengan perbankan/lembaga keuangan bukan bank

Strategi W-T

1. Pengembangan SDM yang berkualitas dalam rangka peningkatan pemberdayaan nelayan
2. Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengarahkan kegiatan usaha perikanan dalam kawasan pelabuhan
3. Meningkatkan mutu ikan hasil tangkapan melalui sertifikasi CPIB
4. Koordinasi dan dukungan lembaga keuangan /perbankan di kawasan PPS Kendari

BAB II

Visi, Misi, dan Tujuan

A. Pembangunan Nasional

1. Visi Presiden

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan “Indonesia sebagai Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur”. Visi pembangunan nasional 2020-2024 merujuk kepada Visi Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

2. Misi Presiden

Visi Presiden diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu sebagai berikut:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Misi 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

Misi 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Misi 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

Misi 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Misi 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

Misi 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

3. Tujuan Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

B. Pembangunan Kelautan dan Perikanan

1. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi KKP Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

2. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- a. **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**, melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
- b. **Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
- c. **Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- d. **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

3. Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

- a. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
- b. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

4. Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. **SS-1 “Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat”**, dengan Indikator kinerja:
 - 1). Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP)
- b. **SS-2 “Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat”**, dengan indikator kinerja:
 - 1) Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan
 - 2) Nilai ekspor hasil perikanan
 - 3) Konsumsi ikan

- c. **(SS-3) “Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan”**, dengan indikator kinerja:
 - 4) Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
 - 5) Luas kawasan konservasi perairan
- d. **(SS-4) “Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat”**, dengan indikator kinerja:
 - 1) Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
 - 2) Kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya
- e. **(SS-5) “Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan”**, dengan indikator kinerja:
 - 1) Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan
- f. **(SS-6) “Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab”**, dengan indikator kinerja:
 - 1) WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola
 - 2) Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir
 - 3) Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
- g. **(SS-7) “Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing”**, dengan indikator kinerja:
 - 1) Produksi perikanan
 - 2) Produksi garam nasional
 - 3) Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil
 - 4) Kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan
- h. **(SS-8) “Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif”**, dengan Indikator kinerja:
 - 1) Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing*
 - 2) Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan
 - 3) Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan
- i. **(SS-9) “Tatakelola pemerintahan yang baik”**, dengan indikator kinerja:
 - 1) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP
 - 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

C. Pembangunan Perikanan Tangkap

1. Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

2. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

DJPT melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- a. **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**, melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap
- b. **Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap
- c. **Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**, melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap
- d. **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

3. Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

- a. **Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan
- b. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap**, yaitu
 - a. Optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan
 - b. Mengembangkan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif
 - c. Mengakselerasi reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap
- c. **Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap**, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
- d. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap**, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas

4. Sasaran Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Sasaran program perikanan tangkap merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJPT sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran Program DJPT 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. **Kesejahteraan nelayan meningkat**, untuk mendukung **SS-1 KKP (Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat)**, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai Tukar Nelayan (NTN), dengan indikator kegiatan:
 - 1) Rata-rata pendapatan nelayan/bulan (Rp.Juta/nelayan/bulan), dengan indikator output:

- Jumlah nelayan yang diidentifikasi sebagai penerima bantuan premi asuransi nelayan (orang);
- Jumlah bantuan premi asuransi nelayan yang tersalurkan (orang);
- Jumlah fasilitasi nelayan yang terlindungi (orang);
- Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (kumulatif) (kelompok);
- Jumlah kawasan sentra/kampung nelayan yang difasilitasi penataannya (lokasi);
- Jumlah kampung nelayan maju (lokasi);
- Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan);
- Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan (bidang);
- Jumlah keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya (RTP).

2. Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan, untuk mendukung SS-3 KKP (Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan), dengan indikator kinerja:

- a. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen), dengan indikator kegiatan:
 - 1) Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan (persen), dengan indikator output:
 - Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit);
 - Jumlah hari layar pemantauan oleh observer di atas kapal perikanan (hari layar);
 - Jumlah WPP yang dievaluasi dan dihitung alokasi sumber daya ikannya (WPP).

3. Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab, untuk mendukung SS-6 KKP (Tatakelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab), dengan indikator kinerja:

- a. WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPP), dengan indikator kegiatan:
 - 1) Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, perairan kepulauan dan ZEEI (persen), dengan indikator output:
 - Jumlah laut ZEEI dan laut lepas yang terkelola sumber daya ikannya (WPP);
 - Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan (persen);
 - Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP).
 - 2) Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat, dengan indikator output:
 - Jumlah perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya (lokasi).

-

4. Produktivitas perikanan tangkap meningkat, untuk mendukung SS-7 KKP (Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing), dengan indikator kinerja:

- a. Jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton), dengan indikator kegiatan:
- 1) Jumlah produksi perikanan tangkap di pelabuhan perikanan/provinsi (juta ton)
 - 2) Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan (lokasi), dengan indikator output:
 - Jumlah pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) (lokasi);
 - Jumlah pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) (lokasi);
 - Jumlah pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) (lokasi);
 - Jumlah pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (lokasi);
 - Jumlah pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional (lokasi).
 - 3) Tingkat operasional pelabuhan perikanan (persen), dengan indikator output:
 - Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) (persen);
 - Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) (persen);
 - Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) (persen);
 - Tingkat operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (persen);
 - Jumlah pelabuhan perikanan yang diusulkan penetapan kelasnya (lokasi).
 - 4) Jumlah kapal perikanan yang terbangun, terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan (unit), dengan indikator output:
 - Jumlah kapal perikanan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan (unit);
 - Jumlah kapal yang terdaftar sebagai kapal perikanan (unit);
 - Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun (unit);
 - Jumlah persetujuan pengadaan kapal perikanan yang diterbitkan (unit).
 - 5) Jumlah rekomendasi teknis, rancangan teknis Standar Nasional Indonesia, sertifikasi dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan (dokumen);
 - 6) Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan memenuhi ketentuan (unit), dengan indikator output:
 - Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dikelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar (unit);
 - Jumlah alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang terbangun (unit).
 - 7) Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang), dengan indikator output:
 - Jumlah perjanjian kerja laut (PKL) yang diterapkan (orang);
 - Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang).

- 8) Persentase mesin dan kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya dan terpantau operasionalnya (persen), dengan indikator output:
 - Jumlah kapal perikanan yang dihitung produktivitasnya (unit);
 - Jumlah kapal perikanan bantuan yang dipantau operasionalnya,
 - jumlah pemantauan dan standarisasi permesinan kapal yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan (provinsi).
 - 9) Persentase penataan perizinan usaha penangkapan ikan (persen), dengan indikator output:
 - Jumlah alokasi izin yang diterbitkan (unit);
 - Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP (SIPI/SIKPI) (unit);
 - Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah (provinsi).
 - b. Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Tangkap (skala kemandirian 1-5), dengan indikator output:
 - Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki (skala kemandirian 1-5);
 - Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Merauke (skala kemandirian 1-5);
 - Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna (skala kemandirian 1-5);
 - Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Nunukan (skala kemandirian 1-5).
- 5. Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap, untuk mendukung SS-9 KKP (Tata kelola pemerintahan yang baik), dengan indikator kinerja yaitu:**
- a. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks);
 - c. Unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (unit kerja);
 - d. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen);
 - e. Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
 - f. Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (level);
 - g. Persentase unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen);
 - h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan

- kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen);
- i. Unit kerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja);
 - j. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Perikanan Tangkap (nilai);
 - k. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

D. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari

1. Visi

Visi PPS Kendari tahun 2020-2024 adalah penjabaran dari visi KKP dan DJPT yaitu *“Terwujudnya Pelabuhan Perikanan yang Maju, Berdaya Saing, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan”* untuk mewujudkan *“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”*.

Berdaulat diartikan sebagai kemampuan penuh untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan untuk digunakan sebesar-besarnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi dari kegiatan perikanan tangkap.

Mandiri diartikan sebagai keadaan untuk dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdaya saing diartikan sebagai keunggulan dan kapasitas yang dimiliki untuk menghadapi persaingan dalam peta kompetensi global dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

Berwawasan Lingkungan

Dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan.

Berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengelola dan melindungi sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh generasi saat ini maupun generasi mendatang.

2. Misi

Dalam mewujudkan Visi tersebut, maka PPS Kendari menetapkan Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM di Lingkup PPS Kendari.
- 2) Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing di PPS Kendari.
- 3) Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan di PPS Kendari.
- 4) Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup PPS Kendari.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra PPS Kendari 2020 – 2024 ini adalah sejalan dengan visi dan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang juga merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan KKP secara umum yaitu :

1. Peningkatan kualitas SDM
2. Pembangunan struktur ekonomi perikanan tangkap, yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup PPS Kendari.

Dengan demikian Rencana Strategis PPS Kendari tahun 2020 – 2024 adalah merupakan arah dan pedoman guna mencapai hasil yang diinginkan dalam periode kurun waktu 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2020 s/d 2024. Rencana Strategis tersebut juga merupakan komitmen organisasi dan sekaligus diharapkan mampu memberikan motivasi dan petunjuk kepada stakeholders yang terlibat dalam aktifitas operasional pelabuhan, khususnya di PPS Kendari.

4. Sasaran Program

Dalam mencapai visi, misi dan tujuan, PPS Kendari menetapkan sasaran program yaitu kondisi yang ingin dicapai PPS Kendari sebagai suatu *outcome/impact* dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pelabuhan perikanan. Pada tahun 2020-2024, PPS Kendari menetapkan 5 (lima) sasaran program, yaitu :

- 1) Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja:
 - Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap
- 2) Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dengan indikator kinerja:
 - Nilai PNBP di PPS Kendari
- 3) Sumber daya ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dengan indikator:
 - Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan
- 4) Produktivitas Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dengan indikator kinerja:
 - Jumlah produksi perikanan tangkap di PPS Kendari.
 - Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan di PPS Kendari
 - Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di PPS Kendari.
 - Presentase penyampaian informasi perizinan pusat dan daerah PPS Kendari.

- 5) Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
- Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.
 - Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.
 - Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dengan target sampai.
 - Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

BAB III

Arah Kebijakan dan Strategi

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap

1. Arah Kebijakan dan Strategi

Secara khusus, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan pada pembangunan sub sektor perikanan tangkap diarahkan untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, serta peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan penterjemahan arah kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke dalam 2 arah kebijakan yakni 1) Kebijakan Pokok dan 2) Kebijakan Pengarusutamaan, termasuk berbagai indikasi strategi pelaksanaan, serta penetapan kegiatan prioritas di dalamnya.



Gambar 3.4. Pendekatan Perencanaan Strategis Sub Sektor Perikanan Tangkap, Arah Kebijakan Utama, Serta Kegiatan Prioritas Tahun 2020-2024

a. Kebijakan Pokok

- 1) Memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan *stakeholder* untuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan berbasis data, informasi, dan pengetahuan yang faktual

Kebijakan ini dilakukan melalui pendekatan: 1) Kajian atas regulasi dalam rangka percepatan investasi sub bidang perikanan tangkap; 2) Konsultasi publik dengan *stakeholder* untuk perumusan kebijakan; 3) Pendekatan ilmiah/akademik berbasis data dan pengetahuan faktual dalam perumusan kebijakan; 4) Koordinasi dengan Kementerian Koordinator dan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk penetapan kebijakan perikanan tangkap; 5) Kunjungan kerja dan diskusi *stakeholders* di pelabuhan perikanan dan sentra nelayan. Arah kebijakan ini dilakukan dengan basis pendekatan data faktual, keterbukaan informasi secara bertanggungjawab berbasis *website* dan transparansi, serta berbasis riset dan pengetahuan faktual.

2) Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap yang berkelanjutan.

Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a) Pengembangan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif

Utamanya akan dilakukan melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi. Operasional kapal perikanan, selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan, serta kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang. Dalam hal ini artinya diharapkan perangkat armada perikanan tangkap tersebut, bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan.

Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi armada penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efisiensi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan. Sistem manajemen armada pun (pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional) perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan.

Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya.

Dalam upaya mewujudkan peningkatan produktivitas armada perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- 1) Restrukturisasi dan modernisasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan, mesin dan alat penangkapan ikan;
- 2) Peningkatan produktivitas penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- 3) Peningkatan standardisasi kapal perikanan yang memenuhi aspek laik laut, laik tangkap dan laik simpan;
- 4) Peningkatan standar rancang bangun, keselamatan dan keamanan kerja di kapal perikanan;
- 5) Peningkatan nilai ekonomi ikan hasil tangkapan melalui peningkatan kualitas penanganan ikan di atas kapal perikanan (CPIB);
- 6) Manajemen tata kelola (pendaftaran, penandaan, persetujuan pembangunan kapal dan pemantauan operasional) kapal perikanan nasional secara elektronik dan terintegrasi;
- 7) Optimalisasi dan mekanisasi penangkapan ikan dengan penerapan rekayasa teknologi penangkapan pada alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan armada perikanan tangkap; dan
- 8) Perlindungan dan peningkatan kapasitas awak kapal perikanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal perikanan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional;
2. Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta;
3. Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan;
4. Peningkatan manajemen data armada perikanan nasional.

- b) Penyediaan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan unggul, terintegrasi dan berwawasan lingkungan

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan *outcome* berupa efisiensi pengelolaan dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah, serta diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur pelabuhan perikanan yang terintegrasi dari hulu

ke hilir, bermutu dan berdaya saing; termasuk integrasinya dengan sektor terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/transportasi.

Pengelolaan perikanan berbasis WPP pun mendorong secara spesifik peran infrastruktur pelabuhan perikanan agar semakin diarahkan sebagai sentra lokasi dari setiap kegiatan perikanan tangkap di setiap WPP, serta untuk semakin mewujudkan konektivitas logistik ikan baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Artinya pelabuhan perikanan mulai memiliki tanggung jawab kewilayahan dalam menjalankan fungsinya. Untuk mendukung hal tersebut, melalui kegiatan prioritas “Pelabuhan Perikanan Unggul”, fasilitas pelabuhan perikanan akan terus dikembangkan pada tahap lebih lanjut, serta ditingkatkan perannya.

Dalam upaya penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- i. Pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan sesuai Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional termasuk pembangunan pelabuhan perikanan bertaraf internasional (*major project* RPJMN);
- ii. Penerapan standarisasi pelabuhan perikanan ramah lingkungan melalui *Eco Fishing Port*, termasuk didalamnya penguatan instrumen SHTI, serta penerapan CPIB dan inspeksi pembongkaran ikan;
- iii. Penguatan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) untuk mendukung keterpaduan data dalam *Data Sharing System* (DSS);
- iv. Penguatan SDM pengelola pelabuhan perikanan termasuk penambahan Syahbandar perikanan;
- v. Standarisasi ketersediaan-kualitas fisik sarana prasarana, operasional, fungsi pelayanan (ISO-9001), serta penetapan aspek hukum di wilayah kerja pelabuhan perikanan (WKOPP);
- vi. Peningkatan sinergi bisnis perikanan terutama dengan sistem pengolahan dan pemasaran, termasuk melalui integrasinya dengan pasar ikan bertaraf internasional;
- vii. Peningkatan keterpaduan pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPTD dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN); baik dari aktivitas, data dan informasi, serta peningkatan konektivitasnya melalui sistem IT, termasuk melalui pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah maupun alternatif peningkatan kelembagaannya;
- viii. Penguatan manajemen risiko fasilitas, termasuk terhadap faktor alam (pendangkalan, bencana alam); dan

- ix. Peningkatan fungsi operasional SKPT Merauke, SKPT Natuna, SKPT Sebatik, dan SKPT Saumlaki.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Alternatif pembiayaan dalam pembangunan fisik infrastruktur pelabuhan perikanan;
2. Sinergitas beberapa regulasi sebagai landasan pengembangan PP; terkait a) Pemerintahan Daerah, khususnya pada proses pengalihan P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) PP dan b) RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil);
3. Optimalisasi peningkatan peran PP sebagai sentra ekonomi dan pusat aktivitas nelayan; utamanya untuk memudahkan fungsi kontrol pemerintah;
4. Intensifikasi tata kelola pengembangan PP secara nasional, baik yang melalui penganggaran APBN KKP, DAK, APBD maupun swasta.

3) Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

Inisiasi pengelolaan perikanan berbasis WPP telah dilakukan sejak satu dekade terakhir, namun operasionalisasinya belum optimal. Padahal sampai dengan saat ini instrumen kelengkapannya tergolong telah siap, mulai dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), Lembaga Pengelola Perikanan (LPP), infrastruktur dasar, maupun mekanisme pengaturan lainnya. Pengelolaan berbasis WPP diarahkan untuk berperan sebagai *management authority* yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola WPP, khususnya dalam pelaksanaan dan evaluasi RPP. Termasuk didalamnya menyelesaikan isu-isu pengelolaan perikanan, serta sebagai wadah koordinasi dan sinergi dari pengelolaan perikanan di masing-masing WPP.

Upaya pemanfaatan sumber produksi akan terus didorong dari lokus-lokus potensial yang selama ini belum optimal intervensinya, seperti pada wilayah perairan darat; mempertimbangkan tidak sedikit daerah yang secara geografis memiliki banyak wilayah perairan darat seperti sungai dan danau. Selain itu semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global sekaligus pertimbangan terhadap kedaulatan NKRI, pemanfaatan usaha penangkapan ikan di ZEEI dan laut lepas juga akan lebih diakselerasi, khususnya pada komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol. Di sisi lainnya peningkatan sistem jaminan ketelusuran terus didorong melalui perluasan cakupan penerapan e-logbook serta penempatan *observer on board* pada kapal perikanan.

Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan operasionalisasi lembaga WPP dalam pengawasan, pengalokasian SDI, sinergi pembangunan pusat-daerah dan antar-daerah, serta penyelesaian isu kewilayahan termasuk nelayan andon;
- b) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui kepatuhan pelaksanaan e-logbook secara nasional untuk kapal > 5 GT, serta perluasan cakupan *observer* di atas kapal perikanan;
- c) Penguatan basis pengalokasian sumber daya ikan, sebagai dasar optimalisasi pemanfaatan;
- d) Peningkatan produktivitas di ZEEI dan laut lepas, khususnya melalui pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol; serta mendorong kerjasama bilateral, regional dan internasional, khususnya pada forum RFMO;
- e) Peningkatan produktivitas perikanan perairan darat, melalui perluasan cakupan pendataan serta pengembangan LP3D (Lembaga Pengelolaan Perikanan Perairan Darat); dan
- f) Mendorong sertifikasi dan sistem ketertelusuran (*traceability*) hasil tangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Penguatan basis data pengalokasian SDI; intensifikasi koordinasi dengan otoritas penyusun stok SDI dan akademisi (<i>backward linkage</i>);
2. Penguatan fungsi manajemen pemanfaatan SDI melalui pengendalian perairan <i>overfishing</i> dan optimalisasi perairan <i>underfishing</i> ; Intensifikasi koordinasi dengan unit kerja pemanfaatan usaha (<i>forward linkage</i>), seperti dalam hal alokasi izin, kapal, dan pengembangan PP;
3. Intensifikasi koordinasi dengan Pemda terkait operasionalisasi WPP, penyelesaian andon, pemanfaatan perairan darat.

4) Reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap

Upaya pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fisheries* (IUUF) sejauh ini telah terbukti mampu berkontribusi pada pemulihan stok sumber daya. Melanjutkan momentum baik tersebut, perizinan didorong untuk menjadi instrumen pengakselerasi usaha (dengan otoritas pemerintah terus melakukan penyederhanaan sistem) yang bertanggungjawab (dengan pelaku usaha semakin tertib aturan).

Dalam rangka mendukung pengelolaan berbasis WPP, alokasi dan evaluasi izin dari otoritas nasional harus menjadi acuan dasar untuk diaplikasikan secara ketat, termasuk di tingkat daerah. Sebagai langkah awal, upaya integrasi perizinan perlu diintensifkan, yakni antar K/L (KKP dan Kemenhub) maupun antara pusat-daerah (KKP dan Pemda). Dengan cakupan pengaturan yang luas dan bersifat antar kewenangan tersebut, pemutakhiran penggunaan *e-service* dan *platform* yang terintegrasi perlu terus didorong untuk membangun sistem perizinan yang *real-time*, transparan, dan terukur.

Dalam upaya mengimplementasikan reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan dan penyebarluasan SILAT;
- b) Sinergi mekanisme perizinan usaha penangkapan ikan dengan Kemenhub, termasuk upaya integrasi dan penyederhanaan perizinan usaha perikanan tangkap;
- c) Sinergi sistem perizinan pusat dan daerah yang lebih tertata;
- d) Pemutakhiran dan peningkatan inovasi pelaksanaan *e-services*;
- e) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan usaha perikanan tangkap; dan
- f) Implementasi perizinan berdasarkan alokasi usaha penangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Sinergitas regulasi terkait Pemerintahan Daerah; kewenangan perizinan dan penerbitan BPKP oleh pemerintah daerah
2. Sinergitas peraturan daerah (Perda) terkait sistem perizinan, dalam upaya mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah
3. Inovasi teknologi dalam pelaporan usaha untuk meningkatkan kualitas data pemanfaatan SDI dan potensi pendapatan negara

5) Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan

Mengacu pada pembelajaran sebelumnya bahwa program bantuan sebenarnya secara akumulatif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, namun dengan beberapa catatan seperti perlunya pelibatan aktif pemerintah daerah maupun nelayan itu sendiri. Dengan demikian kedepannya program serupa perlu didorong agar lebih memperhatikan perspektif *stakeholder* utama nelayan serta memposisikan DJPT bukan hanya sebagai pelaksana lapangan, melainkan juga koordinator dari sistem perlindungan nelayan yang lebih luas.

Pada dasarnya pemenuhan *social security* masih menjadi kebutuhan mendasar

bagi masyarakat miskin, termasuk nelayan. Kebutuhan biaya hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan keluarga, serta perbaikan lingkungan, mendorong nelayan untuk memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dari hasil penangkapan ikan. Sehingga secara psikologis, nelayan akan sangat sensitif terhadap segala perubahan sistem yang dapat mempengaruhi tingkat penghasilannya. Pemenuhan kebutuhan dasar dimaksudkan juga agar nelayan lebih resisten terhadap ketidakpastian usaha penangkapan ikan, sekaligus untuk membentuk jaring pengaman sosial yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi *force majeure* seperti bencana alam.

Dalam hal ini peran DJPT perlu dipertegas yakni untuk memfasilitasi peningkatan usaha nelayan serta sebagai koordinator/penyedia data kenelayanan yang akurat untuk memfasilitasi bantuan antar sektor. Peran nelayan maupun pemerintah daerah pun perlu disinergikan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan nelayan secara tepat maupun mencegah timbulnya perbedaan persepsi antara nelayan dan pemerintah.

Dalam upaya pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan kualitas hidup nelayan melalui pengembangan kampung nelayan maju;
- b) Penguatan usaha dan perlindungan nelayan melalui program bantuan pemerintah, dan fasilitasi perluasan skema asuransi nelayan mandiri;
- c) Pemberdayaan dan kapasitas nelayan terhadap risiko mata pencaharian melalui diversifikasi usaha, peningkatan kewirausahaan serta literasi manajemen keuangan;
- d) Penguatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan; inovasi akses permodalan baik perbankan maupun non perbankan, termasuk intensifikasinya melalui akses LPMUKP; serta inisiasi pengembangan korporasi nelayan (*major project* RPJMN);
- e) Peningkatan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari aspek permukiman (KemenPUPR), kesehatan (Kemenkes), Pendidikan (Kemendikbud), lingkungan (KemenLHK), serta fasilitasi setipikasi hak atas tanah nelayan; dan
- f) Penguatan informasi kenelayanan melalui intensifikasi pelibatan daerah dan komunikasi dengan nelayan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan <i>database</i> kenelayanan untuk menjaring kerjasama pemberdayaan-perlindungan nelayan dengan lintas sektor, pemda, swasta; 2. Penguatan jalur & mekanisme komunikasi dengan nelayan untuk pemetaan kebutuhan nelayan secara tepat dan responsif; 3. Mengarusutamakan nelayan sebagai subjek pemberdayaan, melalui perubahan <i>mindset</i> dan kapasitas nelayan untuk mandiri; bukan lagi hanya sebagai objek.

6) Reformasi Birokrasi DJPT menuju birokrasi yang lebih berkualitas

Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka implementasi RB DJPT berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional yang dilakukan melalui 5 pendekatan, yaitu: 1) *Human Capital*; 2) *Organisation Capital (Right Sizing Organisation)*; 3) *Finacial and Planning Capital*; 4) *Information Capital*, serta 5) *Control Capital*.

Di masa mendatang, tantangan sub-sektor perikanan tangkap diprediksi akan semakin besar, baik pada lingkup sektoral maupun global. Dengan demikian maka peran organisasi kesekretariatan perlu didorong bukan hanya terfokus pada fungsi administratif kesekretariatan saja melainkan juga mulai memperkuat fungsi sebagai unit kerja *think-tank*; berperan dalam memberikan berbagai saran-pertimbangan, memberikan respon cepat (*quick analysis*), serta mengembangkan teori dan model pembangunan perikanan tangkap. Kesekretariatan juga perlu lebih membuka diri untuk mempermudah koordinasi lintas sektor.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, beberapa strategi secara spesifik diarahkan untuk: 1) Peningkatan inovasi program; 2) Intensifikasi manajemen berbasis IT; 3) Peningkatan skala kerjasama bidang perikanan tangkap baik di lingkup KKP (antar Eselon I) maupun Nasional (antar K/L, Pemda, BUMN, swasta); 4) Penerbitan peraturan terkait proses bisnis perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan; 5) Harmonisasi dan revisi regulasi terkait; dan 6) Penguatan manajemen data, dengan pendataan yang lebih menyeluruh.

K/L LAIN	PEMDA	KKP
PU-PERA Jalan / Rumah / Dermaga Pelabuhan / air bersih	Penyiapan lahan	Tata ruang/zonasi/masterplan
KEMEN-ATR Sertifikasi Tanah Nelayan	Identifikasi permasalahan di daerah	Sarana Sistem Rantai Dingin
KEMENDAGRI Percepatan P3D, sinergi pusat-daerah	Identifikasi / pengurusan administrasi / penyaluran bantuan	Penyuluhan, Pelatihan, Penguatan kelembagaan kelompok
KEMEN-KOPERASI Pembentukan / Pembinaan Koperasi	Manajemen data kenelayanan	Riset teknologi perikanan tangkap
KEMHUB Pengukuran GT, dokumen kapal	Partisipasi pada forum kelembagaan WPP	Pengawasan SDKP
KEMENDES Sinergi dana desa, desa nelayan	Sinergi pembiayaan kegiatan prioritas nasional di daerah	Sarana Pemasaran
KEMENKOMAR Koordinasi / sinkronisasi, peluang investasi	Menggalang dukungan pembangunan dari pihak swasta maupun pihak lainnya	BUMN
	Integrasi sistem perizinan	Swasta
	Pengembangan pelabuhan	

Gambar 3.5. Pemetaan Dukungan *Stakeholder* Potensial terhadap Pembangunan Perikanan Tangkap

b. Kebijakan Pengarusutamaan

1) Pembangunan berkelanjutan

Strategi pelaksanaan meliputi: 1) Penerapan konsep ekonomi hijau; 2) Penerapan konsep *eco fishing port*; 3) Alternatif penggunaan bahan bakar gas untuk kapal perikanan; 4) Inovasi teknologi API ramah lingkungan.

2) Gender

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penguatan peran wanita nelayan dalam usaha perikanan tangkap.

3) Modal sosial budaya

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui pengaplikasian kearifan lokal dalam kegiatan penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan.

4) Transformasi digital

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan (*e-logbook*, *e-services* perizinan, *e-layar*, dll).

Untuk mengakselerasi pencapaian arah kebijakan tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap telah menginisiasi beberapa kegiatan prioritas yang diharapkan dapat menjadi kunci, memberikan *multiplier effect* pada kegiatan lainnya, serta menghasilkan dampak langsung pada *stakeholder*. Kegiatan prioritas tersebut meliputi implementasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT), pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol, penyederhanaan

regulasi perikanan tangkap, pengembangan pelabuhan perikanan unggul, pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU), serta armada perikanan yang kompetitif. Kegiatan prioritas setidaknya bersifat, namun tidak terbatas, sebagai akselerator setiap arah kebijakan serta terdapat unsur inovasi didalamnya. Kegiatan lainnya yang mengacu pada beberapa pertimbangan seperti dukungan legislatif dan berbagai kebijakan pimpinan lainnya masih dapat dikategorikan sebagai kegiatan prioritas dalam konteks pembangunan perikanan tangkap secara utuh.

Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT)	Merupakan <i>platform</i> pengajuan izin usaha perikanan tangkap yang memungkinkan penerbitan izin dilakukan hanya dalam waktu 1 jam, dan keseluruhan prosesnya dilakukan secara online. Intensifikasi penggunaan serta berbagai pemutakhiran sistem perizinan masih terus akan dilakukan. Upaya reformasi perizinan ini merupakan salah satu gebrakan untuk meningkatkan pelayanan publik serta dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki iklim investasi perikanan tangkap
Pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol (TCT)	Peluang pemanfaatan investasi tuna diprediksi dapat mencapai Rp 7 Triliun. Seiring upaya diplomasi yang terus diintensifikasi dengan pengelola perikanan regional-RFMO, upaya peningkatan investasi-industrialisasi serta peningkatan kapasitas nelayan lokal pada komoditas TCT terus diakselerasi
Penyederhanaan regulasi	Dalam rangka mewujudkan usaha penangkapan ikan yang berkeadilan serta iklim investasi yang baik, sejumlah peraturan disederhanakan dan beralih pada hukum positif. Beberapa substansi penyederhanaan utama meliputi kemudahan perizinan, pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan yang sebelumnya dilarang, kemudahan <i>transshipment</i> , batasan ukuran kapal yang lebih berdaya saing di ZEEI-laut lepas serta lebih melindungi nelayan kecil di perairan kepulauan
Pelabuhan Perikanan Unggul	Peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai 1) pusat bisnis kelautan dan perikanan terintegrasi; 2) pusat layanan dan pendataan serta ketetelusuran yang maju, andal, dan akuntabel; serta 3) <i>Eco Fishing Port</i> , yakni dalam menjaga mutu ikan dan standarisasi ramah lingkungan
Kampung Nelayan Maju	Konsep perwujudan lingkungan permukiman nelayan yang maju, bersih, sehat dan nyaman yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan nelayan dan keluarganya. Salah satu strategi

Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
	pengembangannya adalah melalui integrasi permukiman nelayan dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi, seperti pelabuhan perikanan dan kawasan wisata bahari-kuliner
Armada Perikanan yang Kompetitif	Untuk mewujudkan industrialisasi perikanan, diperlukan armada perikanan (kapal perikanan, alat penangkapan ikan, awak kapal perikanan), serta manajemennya yang kompetitif. Konsep yang diusung yakni pemenuhan aspek ketertelusuran (<i>traceability</i>), standar keamanan kapal, penanganan ikan (<i>fish handling</i>), serta standar keselamatan kerja

B. Arah Pembangunan Pelabuhan Perikanan (PPS) Kendari

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pusat yang berada di daerah, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, menetapkan arah dan kebijakan organisasi yang diupayakan untuk senantiasa memperhatikan aspirasi dan kebutuhan riil yang ada di masyarakat, serta berupaya untuk menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah sehingga terjadi sinergi program dan kegiatan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Guna mewujudkan sasaran pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima dalam operasional pelabuhan perikanan dengan fasilitas produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar, maka kebijakan dan strategi yang akan ditempuh dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan adalah melalui:

1. Peningkatan kualitas pelayanan

Dalam pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan terhadap pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pelayanan jasa dan fasilitas usaha perikanan; fasilitasi dan koordinasi untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan; fasilitasi publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan, maka upaya peningkatan pelayanan terhadap aktifitas tersebut terus diupayakan secara optimal.

Kebijakan PPS Kendari dalam peningkatan pelayanan tersebut ditempuh antara lain melalui upaya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan kapasitas SDM pelabuhan, penyediaan peralatan pendukung pelayanan, pemasangan papan penerangan/informasi pelayanan, penyebaran data dan informasi tepat sasaran, pertemuan dengan stake holders melalui kegiatan *cooffe morning* dan sosialisasi ketentuan/peraturan yang terkait dengan pelayanan kepelabuhanan.

2. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan

Guna mewujudkan PPS Kendari sebagai kawasan *eco fishing port*, maka upaya peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan terus diupayakan secara optimal untuk

memfasilitasi seluruh kegiatan pelayanan kepelabuhanan, sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya usaha perikanan maupun usaha pendukung lainnya mulai dari pra produksi, produksi sampai pasca produksi yang berwawasan lingkungan, sehingga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, perkembangan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya menuju pada kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan tersebut meliputi penyempurnaan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan antara lain : Pembangunan jalan kawasan industri areal pelabuhan selatan, Pembangunan revetment dengan konstruksi concrete sheet pile, IPAL dll. Perbaikan revetment, pengerukan kolam dan alur pelabuhan secara periodik sesuai dengan kebutuhan. Pemeliharaan fasilitas operasional lainnya juga akan senantiasa memperoleh perhatian secara proporsional.

3. Pengembangan sistem informasi perikanan

Kebijakan pengembangan system informasi perikanan diarahkan pada peningkatan kualitas, akurasi data sebagai informasi perikanan di PPS Indikator Kinerja Utama dengan beberapa ragam penyampaian informasi baik dalam bentuk buku statistik, leaflet maupun poster dengan pengembangan jejaring distribusi informasi diantaranya melalui media ceatak dan elektronik, sosialisasi, visitor dan setiap kesempatan event lainnya.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA

DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja

Tabel 6. Indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai dari program kegiatan yang telah direncanakan untuk periode 2020-2024. sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan	1 Jumlah produksi perikanan tangkap di PPS Kendari (Ton)	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
		2 Nilai produksi perikanan tangkap di PPS Kendari (Milyar)	120	-	-	-	-
		3 Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Juta)	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2
2	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan yang adil berdaya saing, dan berkelanjutan	4 Prsentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen)	100	-	-	-	-
		5 Jumlah lembaga pengelolaa perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP)	1	1	1	1	1
		6 Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (unit)	300	305	310	315	320
		7 Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (persen)	80	80	80	80	80
		8 Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di PPS Kendari (orang)	40	40	40	40	40
		9 Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (lokasi)	1	1	1	1	1
		10 Persentase Penyampaian informasi perizinan pusat – daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (%)	100	100	100	100	100
		11 Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (nelayan)	50	50	50	50	50
3	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang kompeten, profesional dan berintegritas	12 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks)	72	72	72	72	72
4	Terwujudnya birokrasi lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	13 Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	100	100	100	100	100
		14 Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	100	100	100	100	100
		15 Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	100	-	-	-	-

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
5	Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari secara efisien dan akuntabel	16	Nilai kinerja anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (nilai)	Baik (80)	Baik (80)	Baik (80)	Baik (80)	Baik (80)

B. Kerangka Pendanaan

Tabel 7. Rencana Pendanaan Kegiatan dan Anggaran di PPS Kendari Tahun 2020-2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)					LOKASI	APBN (PUSAT/DK/TP)
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
PENGLOLAAN KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN								26,365,603,000	29,723,332,527	38,790,426,145	73,310,131,051	43,778,708,179	PPS KENDARI	PUSAT
A	PENGLOLAAN KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN							112,100,000	150,000,000	175,000,000	190,000,000	200,000,000	PPS KENDARI	
1.	Awak kapal perikanan yang tersertifikasi (Base Line)	Orang	40	40	40	40	40	7,000,000	25,000,000	35,000,000	45,000,000	50,000,000	PPS KENDARI	PUSAT
2.	Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan (Base Line)	Provinsi	1	1	1	1	1	60,100,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	PPS KENDARI	PUSAT
3.	Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan (Base Line)	Orang	250	255	260	270	275	45,000,000	60,000,000	75,000,000	80,000,000	85,000,000	PPS KENDARI	PUSAT
B	PENGLOLAAN PELABUHAN PERIKANAN							8,500,160,000	10,047,781,127	17,140,590,600	49,501,234,960	17,601,504,756		
1.	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang diidentifikasi dan/atau ditingkatkan fasilitasnya (Base Line)	Lokasi	1	1	1	1	1	3,575,160,000	3,932,676,000	4,325,943,600	4,758,537,960	5,234,391,756	PPS KENDARI	PUSAT
2.	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang meningkat operasionalnya (Base Line)	Persen	80	80	80	80	80	4,050,000,000	4,455,000,000	4,900,500,000	5,390,550,000	5,929,605,000	PPS KENDARI	PUSAT
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)	Layanan	1	1	1	1	1	875,000,000	1,660,105,127	7,914,147,000	39,352,147,000	6,437,508,000	PPS KENDARI	PUSAT
C	PENGLOLAAN PERIZINAN DAN KENELAYANAN							59,318,000	62,123,900	65,065,295	68,148,816	71,381,420	PPS KENDARI	
1.	Pembinaan dan implementasi integrasi sistem perizinan pusat-daerah (Base Line)	Provinsi	1	1	1	1	1	51,318,000	53,883,900	56,578,095	59,407,000	62,377,350	PPS KENDARI	PUSAT
2.	Nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (Base Line)	Orang	50	50	50	50	50	8,000,000	8,240,000	8,487,200	8,741,816	9,004,070	PPS KENDARI	PUSAT
D	PENGLOLAAN SUMBERDAYA IKAN							172,286,000	189,514,600	208,466,060	229,312,666	252,243,933	PPS KENDARI	
1.	Laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber daya ikannya (Base Line)	WPP	1	1	1	1	1	7,186,000	7,904,600	8,695,060	9,564,566	10,521,023	PPS KENDARI	PUSAT
2.	Kapal perikanan yang menerapkan Logbook penangkapan ikan (Base Line)	Unit	300	305	310	315	320	45,100,000	49,610,000	54,571,000	60,028,100	66,030,910	PPS KENDARI	PUSAT
3.	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (Base Line)	WPP	1	1	1	1	1	120,000,000	132,000,000	145,200,000	159,720,000	175,692,000	PPS KENDARI	PUSAT
E	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP							17,521,739,000	19,273,912,900	21,201,304,190	23,321,434,609	25,653,578,070	PPS KENDARI	
1.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Base Line)	Layanan	1	1	1	1	1	1,542,581,000	1,696,839,100	1,866,523,010	2,053,175,311	2,258,492,842	PPS KENDARI	PUSAT
2.	Layanan Perkantoran (Base Line)	Layanan	1	1	1	1	1	15,979,158,000	17,577,073,800	19,334,781,180	21,268,259,298	23,395,085,228	PPS KENDARI	PUSAT

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2020 - 2024 disusun dalam rangka memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, sehingga penyusunan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Renstra Pelabuhan Perikanan Samudera Samudera Kendari Tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional menjadi prioritas utama, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PPS Kendari. Namun demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat terutama dalam menggiring program prioritas PPS Kendari dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap secara umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan agar dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong.